

BAB I

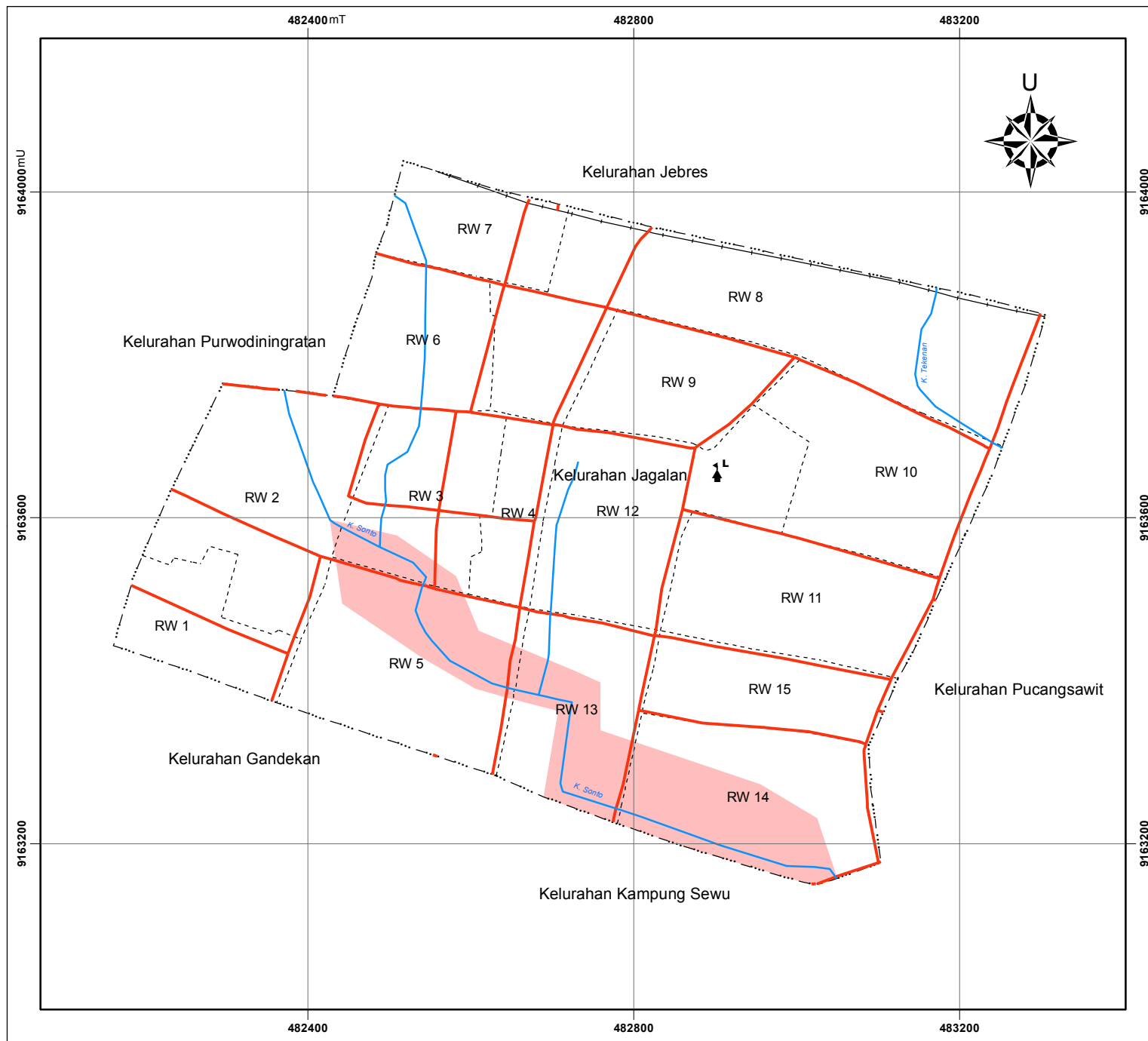
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, 2007) banjir adalah aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengairan air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

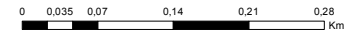
Kota Surakarta berada di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah rawan akan terjadi bencana banjir yang memiliki ranking Nasional 84 yang dikelaskan tinggi dengan skor 42 termasuk kelas tinggi (BNPB, 2011). Kecamatan Jebres adalah salah satu Kecamatan di Kota Surakarta yang terkena bencana banjir, pada tahun 2011 bulan mei tergenang banjir dengan kedalaman air yang variatif mulai dari 0,5 meter sampai dengan 1,5 meter sedikitnya 120 rumah tergenang banjir yang disebabkan karena meluapnya Sungai Bengawan Solo. Kelurahan Jagalan termasuk kedalam

salah satu dari 20 kelurahan yang rawan akan terjadi bencana banjir di Kota Surakarta setidaknya ada 3 RW yang tergenang banjir di kelurahan tersebut.



PETA ANCAMAN BANJIR KELURAHAN JAGALAN KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

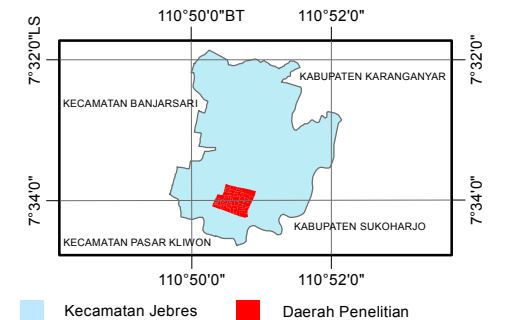
Skala 1 : 7.000



Proyeksi : Transverse Merkator
Grid Koordinat : Universal Transverse Merkator
Zona : 49 South
Datum : WGS 1984

LEGENDA

-  Kantor Kelurahan
-  Batas Kelurahan
-  Batas RW
-  Jalan Lokal
-  Rel Kereta Api
-  Sungai
-  Ancaman Banjir



Sumber :
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :25.000
Badan Informasi Geo Spasial (BIG)
Aparat Kelurahan Jagalan

Disusun Oleh :
Muhammad Rizal Ikhsannudin
A610100092
Pendidikan Geografi Tahun 2014



Gambar 1.1. Peta Ancaman Banjir Kelurahan Jagalan

Menurut Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam Peraturan Kepala BNPB no 1 Tahun 2012. Pasal 4 undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Peraturan Kepala BNPB no 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya.
- 2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana.
- 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 1 Tahun 2012. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pemerintah Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota perlu berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi desa-desa/kelurahan agar tangguh bencana

“Sigap dan tanggap bencana”. Peran pemerintah desa/kelurahan akan diatur dengan lebih terinci dalam pedoman yang akan diterbitkan.

Secara garis besar desa/kelurahan tangguh bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Legislasi
- 2) Perencanaan
- 3) Kelembagaan
- 4) Pendanaan
- 5) Pengembangan kapasitas
- 6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan mengacu juga pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Peranan pemerintah desa dan masyarakat akan terwujud dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih daerah tersebut sebagai daerah penelitiannya karena dirasa pada Kelurahan Jagalan merupakan salah satu kelurahan yang terkena bencana banjir dan

diperlukan ketahanan dari aparat pemerintah daerah dalam menghadapi resiko bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian "Tingkat Ketangguhan Pemerintah Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Surakarta dalam Menghadapi Bencana Banjir".

A. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak menyimpang dan terlalu melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Ruang lingkup penelitian tentang Pemerintah Kelurahan Jagalan dalam mengetahui Tingkat Ketangguhan Desa/Kelurahan.
2. Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah adalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar Peran Pemerintah Desa dalam menghadapi bencana yang mencerminkan Tingkat Ketangguhan Desa di Kelurahan Jagalan dalam menghadapi bencana?

2. Seberapa besar Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengkaji dan mendiskripsikan :

1. Mengetahui Tingkat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terkait peran yang diberikan Pemerintah Kelurahan Jagalan dalam menghadapi bencana banjir.
2. Mengetahui Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan ilmu tentang:

1. Memperkaya khasanah ilmu geografi dan penentu langkah awal untuk Pemerintah Kelurahan Jagalan dalam mengayomi masyarakat, terutama dalam hal bencana banjir.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Pemerintah Kelurahan Jagalan terhadap bencana banjir.